

BAB III:
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
DITERAPKANNYA KEBIJAKAN BLOKADE QATAR
OLEH ARAB SAUDI MELALUI PERSPEKTIF *DECISION*
MAKING

Setelah membahas tentang kebijakan blokade yang diterapkan Arab Saudi terhadap Qatar pada bab sebelumnya, pada bab ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan blokade terhadap Qatar dengan menggunakan lensa teoritis yang bernama *Decision Making*. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I tepatnya pada bagian kerangka konseptual, bahwa teori ini berfungsi untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Coplin mendefinisikan teori ini sebagai cara untuk mengetahui perilaku negara dalam hubungan internasional. ia juga menambahkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi seorang pembuat kebijakan dalam menentukan sebuah kebijakan luar negeri, faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, kelompok domestik akan menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka, lalu politisi akan melihat hal ini sebagai peluang untuk mencari kekuatan dengan membangun koalisi bersama kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan pada faktor eksternal, pemerintah akan berupaya untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam rangka untuk memenuhi

kepentingan domestik, sambil meminimalisir konsekuensi yang merugikan pihak asing (Coplin, 2003). Secara fungsi, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seorang aktor hubungan internasional dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang akan dibuatnya. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang ada di negaranya. Hal itu dilakukan dengan cara melihat pada keadaan domestik dan keadaan internasionalnya.

Dalam konteks ini, penulis akan mencoba untuk menganalisis secara khusus terkait faktor-faktor yang membuat Arab Saudi harus mengeluarkan kebijakan untuk blokade terhadap Qatar, dengan memperhatikan keadaan pada faktor internal atau domestik Arab Saudi itu sendiri dan juga faktor eksternalnya, yang dalam hal ini adalah keadaan di kawasan Timur Tengah secara umum.

3.1 Faktor Internal

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada faktor internal dalam teori *Decision Making*, menerangkan bahwa kelompok-kelompok domestik memiliki peranan penting dalam mendorong aktor pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengeluarkan atau membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok tersebut, politisi yang menyaksikan hal ini tentu menganggapnya sebagai peluang bagi mereka untuk menambah kekuatan dengan cara menjalin koalisi

bersama kelompok-kelompok tersebut. Berbicara mengenai faktor di faktor internal atau lebih tepatnya faktor domestik yang menyebabkan Arab Saudi memberlakukan kebijakan blokade terhadap Qatar sebenarnya menjadi sebuah bahasan yang cukup rumit, hal ini tidak lain disebabkan oleh sistem pemerintahan Arab Saudi itu sendiri yang hingga saat ini masih bertahan dengan monarki absolutnya. Secara tidak langsung penulis ingin mengatakan bahwa faktor domestik yang menyebabkan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan tersebut kemungkinan besar akan banyak tertuju pada keadaan dalam lingkup Kerajaan Arab Saudi semata, dan akan sangat sulit untuk melihat adanya dorongan dari kalangan masyarakat bawah, karena hal tersebut hampir mustahil terjadi di negara yang menganut sistem monarki absolut seperti Arab Saudi.

3.1.1 Faktor Internal Kerajaan Arab Saudi

Jika ditinjau dari keadaan internal domestiknya yang dalam hal ini adalah kerajaan Arab Saudi itu sendiri mungkin sangat jarang diketahui bahwa salah satu faktor penyebab Arab Saudi menerapkan blokade terhadap Qatar tersebut adalah karena faktor dendam sejarah pada tahun 1995 yang telah lama dipendam oleh Kerajaan Arab Saudi, ditambah lagi dengan ambisi dari putra mahkota, pangeran Muhammad bin Salman yang saat ini menjalankan urusan

Kerajaan dan berniat untuk mengendalikannya di seluruh wilayah juga memiliki pandangan yang suram terhadap Qatar (بدر كحلان, 2017). Sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Qatar sudah mulai merenggang semenjak tahun 1995, tepatnya ketika pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani menggulingkan kekuasaan ayahnya sendiri, Khalifa bin Hamad Al Thani yang saat itu tengah berlibur ke Jenewa, kudeta tersebut ditentang keras oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, pasalnya pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani muncul dengan konsep kepemimpinan baru yang cenderung bertentangan dengan arah perpolitikan Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya, berbeda dengan ayahnya, Khalifa bin Hamad Al Thani yang pro terhadap Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya di Timur Tengah (Kristanti, 2017).

Sekalipun sulit untuk membayangkan bahwa masyarakat akan berani untuk menyuarakan pendapat mereka terkait blokade yang dilakukan Arab Saudi terhadap Qatar, namun ternyata hal tersebut memang benar terjadi, dimana beberapa masyarakat Arab Saudi yang juga telah menikah dengan warga Qatar menyampaikan kekesalannya terkait imbas dari blokade yang dibuat oleh Arab Saudi tersebut. Sebagaimana telah dicontohkan pada bab II, tepatnya pada bagian D terkait dampak blokade Arab Saudi terhadap Qatar

bagi kemanusiaan, dimana seorang perempuan bernama Fatimah, seorang warga Arab Saudi yang menikah dengan warga Qatar dan telah memiliki empat orang anak menceritakan kekesalannya terkait imbas dari kebijakan blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi terhadap Qatar, dalam wawancara yang dilakukan oleh DIFI (*Doha International Family Insitute*), ia mengatakan bahwa situasi ini semakin memperkeruh suasana, dan mempersulitnya untuk menjalin hubungan kerabat-kerabatnya di Qatar, hal tersebut disebabkan oleh blokade yang telah memaksanya untuk menarik diri dari media sosial (الجهني, 2018). Namun tentunya hal tersebut bukanlah menjadi suatu yang berarti bagi Arab Saudi untuk tidak meneruskan kebijakan blokade mereka terhadap Qatar, karena sebenarnya faktor yang paling berpengaruh dalam penerapan kebijakan blokade tersebut adalah internal Kerajaan Arab Saudi itu sendiri.

3.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal domestik Arab Saudi juga didorong oleh faktor eksternal . Terkait dengan faktor-faktor eksternal, dengan kata lain adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkup internasional tentang pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan blokade Arab Saudi, penulis bermaksud untuk membagi faktor-faktor yang ada pada faktor eksternal tersebut ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama adalah faktor

kedekatan antara Qatar dan Iran, dimana akan menjabarkan bagaimana hubungan antara Qatar dan Iran ini berpengaruh pada kebijakan blokade yang diterapkan oleh Arab Saudi terhadap Qatar. Bagian kedua akan membahas mengenai faktor kedekatan Qatar dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin*, dimana hal ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Arab Saudi menerapkan kebijakan blokade terhadap Qatar. Sedangkan pada bagian ketiga, penulis akan lebih banyak menyoroti terkait bagaimana Arab Saudi menganggapi negara Timur Tengah yang mencoba untuk bersikap netral, dalam artian tidak berada di pihak manapun, baik Arab Saudi maupun Qatar. Negara tersebut adalah Kuwait yang mencoba untuk menjadi penengah atas bagi negara-negara yang terlibat dalam sengketa krisis Teluk, termasuk Arab Saudi dan Qatar.

3.2.1 Faktor Hubungan Qatar Dengan Iran

Qatar dan Iran merupakan kedua negara Timur Tengah yang saling bertetangga antara satu dengan yang lainnya, keduanya memiliki sedikit kesamaan dalam hal geografi, jumlah populasi penduduk, struktur demografi, sejarah, politik dan juga ideologi. Dengan sekian banyak persamaan tersebut, keduanya digambarkan sebagai negara yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mereka, dengan memaksakan keadaan pada satu sisi serta strategi dan pilihan kebijakan yang ditentukan oleh pemimpin mereka

untuk negara-negara lainnya (Kamrava, 2017). Hubungan antara kedua negara telah terjalin secara baik pada tahun 1995, pada masa itu, Qatar dipimpin oleh pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani, yang banyak mengubah pola perpolitikan Qatar pada masa itu. Qatar yang sebelumnya berhubungan baik dengan Arab Saudi ketika masiih dipimpin oleh Khalifa bin Hamad Al Thani, saat itu berubah seketika, pada masa pemerintahan pangeran Hamad bin Khalifa Al Thani. Pada tahun itu, Qatar mulai menjalin hubungan baik dengan Iran melalui kerja sama dalam pengelolaan gas alam cair dari *Reservoir* yang terletak di lepas pantai North Field, yang luasnya setara dengan Qatar (Prastiwi, 2017). Kendati begitu hubungan antara keduanya tidak selalu baik, pada tahun 2010 hingga tahun 2016, Qatar sempat memberlakukan sanksi internasional terhadap Iran, diwaktu yang bersamaan, Qatar bahkan sempat menarik duta besarnya dari Iran pada februari 2016 (Katzman, 2019).

Namun saat ini, hubungan antara kedua negara sudah kembali normal, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hassan Rouhani, Presiden Iran bahwa ia bersedia untuk meningkatkan hubungan baik antara Iran dan Qatar, dan pada 5 juni 2019 lalu emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani didapati sedang bertukar salam Idul Fitri bersama presiden Iran tersebut (Utomo, 2019). Kabar ini

tentunya merupakan kabar baik bagi Qatar, namun tidak bagi Arab Saudi, karena salah satu yang menyebabkan putusnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar adalah karena kedekatan Qatar dengan Iran, negara yang sangat dimusuhi oleh Arab Saudi. Kedekatan tersebut pulalah yang kemudian memicu Arab Saudi untuk melakukan blokade terhadap Qatar, karena Arab Saudi menilai bahwa Iran adalah ancaman bagi kawasan, dan jika Qatar ingin krisis diplomatik ini segera diselesaikan salah satu tuntutan Arab Saudi adalah menutup misi diplomatik di Taheran dan mengurangi intensitas kedekatan Qatar dengan Iran (Unit, 2017).

Adapun faktor lain yang mungkin bisa jadi pemicu retaknya hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar mungkin disebabkan oleh keberpihakan Qatar pada Iran dilihat dari bagaimana Qatar memilih Iran sebagai partnernya dalam kerja sama ekonomi dibanding Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya sebagaimana telah tertera diatas, hal ini tentunya menimbulkan kecemburuan bagi Arab Saudi, dan secara tidak langsung memancing negara tersebut untuk berupaya membuktikan eksistensinya di Timur Tengah bahwa Arab Saudi masih sangat bisa untuk membangkitkan perekonomiannya bersama negara-negara Teluk tanpa bantuan Qatar.

3.2.2 Faktor Kedekatan Qatar Dengan *Ikhwanul Muslimin*

Kedekatan antara Qatar dan organisasi *Ikhwanul Muslimin* memang sudah tidak diragukan lagi, dari sekian banyak negara di Timur Tengah, hanya Qatar yang terlihat paling membuka diri terhadap organisasi ini, hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh ternama dari organisasi tersebut yang kemudian diberi suaka politik oleh Qatar dan memperoleh kewarganegaraan dari negara tersebut. Sebut saja, Yusuf Qardhowi; salah satu tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang cukup terkemuka di kalangan dunia Islam maupun umum, beliau sangat terkenal dengan pemikirannya yang moderat “*middle path*” atau menggunakan jalan tengah, yaitu pemikiran Islam yang tidak terlalu konservatif (*salafi*), namun tidak juga terlalu bebas, atau menerima sepenuhnya pemikiran Barat yang liberal (Jonston, 2014). Sekalipun Qardhowi adalah orang yang namanya cukup terkemuka di Qatar, disebabkan oleh kecerdasannya dalam bidang ilmu Fiqh, dimana beliau juga merupakan seorang pendiri *Faculty Of Shari'a* di Qatar *University* pada tahun 1961, namun beliau bukanlah satu-satunya tokoh *Ikhwanul Muslimin* yang terkenal di Qatar, terdapat beberapa tokoh *Ikhwanul Muslimin* lainnya yang juga menduduki posisi-posisi strategis di Qatar, yang mayoritasnya terpusat pada sektor pendidikan. Adapun

tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Abdul Badi Saqr yang juga berasal dari Mesir dan pindah ke Qatar pada tahun 1954, beliau pernah menjabat sebagai direktur bidang pendidikan di Qatar dan juga pernah menjadi kepala perpustakaan nasional Qatar, selain itu terdapat juga tokoh

Ikhwanul Muslimin yang merupakan utusan langsung dari Hassan Al-Banna untuk pergi ke Palestina pada tahun 1946, beliau bernama Abdel Muaz Al Sattar. Beliau pernah menjabat sebagai inspektur sekolah di Qatar, kemudian pernah menjabat sebagai kepala sekolah dalam ilmu Islam dibawah kementerian pendidikan Qatar (Roberts, 2014).

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi yang dilabeli teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir, hal ini salah satunya disebabkan oleh sejarah dari *Ikhwanul Muslimin* yang dikecam oleh Arab Saudi, dimana mereka pernah melakukan pembunuhan terhadap perdana menteri Mesir dan wakilnya, Maher Pasha dan Mahmud fahmi An-naqrasny sebelum aksi demo yang terjadi pada tahun 1954

(اسامة, 2010).

Dengan adanya sejarah tersebut, rasanya sangat wajar jika Arab Saudi dan Mesir sangat membenci *Ikhwanul Muslimin*, karena Arab Saudi menganggap bahwa organisasi tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi kawasan, persepsi tersebut kemudian diimplementasikan dengan melakukan

blokade terhadap Qatar, karena kedekatannya dengan *Ikhwanul Muslimin*. Secara tidak langsung kedekatan antara Qatar dan *Ikhwanul Muslimin* telah memancing Arab Saudi untuk melakukan blokade terhadap Qatar. adapun hal lainnya yang membuat kemarahan Arab Saudi kepada Qatar semakin memuncak adalah keterlibatan Qatar dalam melakukan pendanaan terhadap *Ikhwanul Muslimin*, hal tersebut dibuktikan dalam sebuah buku yang ditulis oleh dua jurnalis Perancis yang bernama Georges Malbrunot dan Christian Chesnot menggambarkan bahwa Qatar telah menggelontorkan dana yang besar untuk proyek *Ikhwanul Muslimin* di seluruh Eropa, pada halaman pengantar buku tersebut, terdapat dokumen-dokumen rincian pendanaan dari puluhan masjid dan masyarakat Islam untuk mempromosikan *Ikhwanul Muslimin* di Perancis dan Swiss (Fadhilah, 2019). Relevansinya dengan teori *Two Unsur Game* adalah, bahwa Arab Saudi melihat adanya gejolak atau tekanan yang ditimbulkan oleh organisasi *Ikhwanul Muslimin* di Timur Tengah, dan Qatar telah terpengaruh akan hal tersebut, khawatir akan kemungkinan bertambahnya negara yang menerima organisasi tersebut, akhirnya Arab Saudi harus menentukan sikap dengan melakukan blokade terhadap Qatar atas keberpihakannya terhadap organisasi tersebut.

3.2.3 Faktor Dukungan dari Kawasan

Selain mempertimbangkan keadaan yang berlaku di internal domestik atau nasionalnya, Arab Saudi juga melihat peluang yang berlaku di internal kawasan Timur Tengah itu sendiri, dimana Arab Saudi melihat bahwa kebijakan blokade yang dibuat olehnya didukung oleh beberapa negara Arab lainnya, dukungan tersebut dapat dilihat melalui keikutsertaan beberapa negara Arab lainnya dalam penerapan kebijakan blokade terhadap Qatar, adapun negara-negara tersebut antara lain adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir (Kucukasci, 2019). Jika disesuaikan dengan teori *Decision Making*, penulis melihat bahwa Arab Saudi merupakan aktor politis yang berupaya untuk membangun kekuatannya dengan menjalin koalisi bersama negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama dengannya dalam rangka untuk mencapai keuntungan politik di kawasan Timur Tengah. Keuntungan politik yang mungkin akan diterima Arab Saudi dapat berupa klaim bahwa Arab Saudi adalah negara yang paling hegemon di Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk dan di kawasan Timur Tengah.

**Tabel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Arab Saudi
Dalam Melakukan Blokade Terhadap Qatar Ditinjau
Dari Perspektif *Decision Making***

Tabel II

No	Faktor internal (Negara)	Faktor eksternal
1.	Internal Kerajaan Arab Saudi (dendam lama terhadap Qatar sejak tahun 1995)	Hubungan Qatar dengan Iran
2.		Hubungan Qatar dengan <i>Ikhwanul Muslimin</i>
3.		Faktor Dukungan dari Kawasan, yaitu UEA, Bahrain dan Mesir yang mendukung Arab Saudi dalam melakukan blokade terhadap Qatar, dilihat dari keikutsertaan ketiga negara tersebut dalam menerapkan blokade terhadap Qatar.